



HARMONI MULTIKULTUTRAL : KERAGAMAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN, UNI EROPA DAN LIGA ARAB

Fahmi Ihsan Margolang

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
e-mail: fahmiimrgolang@gmail.com

Rahma zahrani

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
e-mail: Rahmazahrni123@gmail.com

Syara Sapriliani

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
e-mail: syarasapriliani144@gmail.com

Taufik Mushlih

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
e-mail: taamush08@gmail.com

Abstract

This study explores the role of cultural diversity in dispute resolution within ASEAN, the European Union, and the Arab League. Using a qualitative library research method, this study analyzes relevant literature through the lens of multiculturalism and regional integration theories. Multiculturalism emphasizes the importance of cultural recognition, while regional integration theories, such as neo-functionalism and intergovernmentalism, highlight the roles of supranational institutions and member states. The findings indicate that cultural diversity influences dispute resolution approaches in the three organizations. ASEAN prioritizes consensus, the European Union employs legal mechanisms, while the Arab League faces internal political challenges. This study concludes that cultural recognition and robust institutional frameworks are key to effective dispute resolution.

Keywords: *Dispute Resolution, Multiculturalism, Regional Integration, ASEAN, European Union, Arab League.*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran keragaman budaya dalam penyelesaian sengketa di ASEAN, Uni Eropa, dan Liga Arab. Menggunakan metode kualitatif *library research*, penelitian ini menganalisis literatur terkait dengan teori multikulturalisme dan integrasi regional. Teori multikulturalisme menekankan pentingnya pengakuan budaya, sedangkan



teori integrasi regional, seperti neo-fungsionalisme dan intergovernmentalisme, menyoroti peran institusi supranasional dan negara anggota. Hasilnya menunjukkan bahwa keragaman budaya mempengaruhi pendekatan penyelesaian sengketa di ketiga organisasi. ASEAN mengutamakan konsensus, Uni Eropa menggunakan mekanisme hukum, sementara Liga Arab menghadapi tantangan politik internal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan budaya dan kerangka institusional yang kuat adalah kunci untuk penyelesaian sengketa yang efektif.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Multikulturalisme, Integrasi Regional, ASEAN, Uni Eropa, Liga Arab.

A. Pendahuluan

Keragaman budaya merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakan berbagai organisasi regional di dunia, seperti ASEAN, Uni Eropa, dan Liga Arab. Dalam konteks global yang semakin kompleks, peran keragaman budaya dalam proses penyelesaian sengketa menjadi semakin relevan dan penting. Di berbagai kawasan ini, perbedaan budaya, agama, dan nilai-nilai sosial sering kali menjadi sumber ketegangan dan konflik. Namun, keragaman ini juga dapat menjadi sumber kekuatan jika dikelola dengan baik.

ASEAN, sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, menghadapi berbagai sengketa internal yang seringkali berkaitan dengan perbedaan etnis dan budaya.¹ Misalnya, konflik di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya telah menjadi salah satu isu krusial yang mempengaruhi stabilitas kawasan. Selain itu, ketegangan di Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN menunjukkan betapa kompleksnya dinamika regional di kawasan ini.²

Uni Eropa, di sisi lain, menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan berbagai negara dengan latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Krisis migran yang memuncak pada tahun 2015 menyoroti kesulitan Uni Eropa dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dan nilai-nilai bersama. Kebangkitan nasionalisme dan populisme di beberapa negara anggota, seperti Brexit di Inggris, juga menunjukkan tantangan integrasi yang dihadapi Uni Eropa.³

¹ Monica Roza Nandelialda, "Eksistensi ASEAN Sebagai Organisasi Regional Pada Aspek Sosial Budaya Melalui Program Student Mobility," *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 3 (2024): 436–44, <https://doi.org/10.46799/adv.v2i3.213>.

² Amitav Acharya, "Constructing a Security Community in Southeast Asia," *Constructing a Security Community in Southeast Asia*, 2014, <https://doi.org/10.4324/9781315796673>.

³ Thomas Risse, *A Community of Europeans? Transnational Identities and Public Spheres* (New York: Cornell University Press, 2010).



Liga Arab, yang terdiri dari negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sering kali dihadapkan pada konflik politik dan sektarian yang mendalam. Perang saudara di Suriah, konflik di Yaman, dan ketegangan antara negara-negara Teluk merupakan contoh nyata bagaimana perbedaan politik dan sekte agama dapat mempengaruhi stabilitas regional.⁴ Ketidakmampuan Liga Arab untuk secara efektif menengahi konflik-konflik ini menyoroiti tantangan besar yang dihadapi organisasi ini.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keragaman budaya mempengaruhi penyelesaian sengketa di ketiga organisasi regional ini. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa library research, penelitian ini akan menganalisis berbagai literatur yang relevan untuk memahami dinamika multikulturalisme dan integrasi regional dalam konteks penyelesaian sengketa. Teori multikulturalisme, yang menekankan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya, akan digunakan sebagai salah satu kerangka analitis utama. Selain itu, teori integrasi regional seperti neo-fungsionalisme dan intergovernmentalisme akan digunakan untuk mengeksplorasi dinamika institusi supranasional dan peran negara anggota dalam proses penyelesaian sengketa.⁶

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman budaya dalam mencapai penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis, tetapi juga memberikan pandangan praktis bagi pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait dalam upaya mereka untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan yang multikultural.⁷

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengeksplorasi pengaruh keragaman budaya dan struktur kelembagaan dalam penyelesaian sengketa di ASEAN, Uni Eropa, dan Liga Arab. Penelitian ini

⁴ Michael N. Barnett, *Dialogues in Arab Politics: Negotiations in Regional Order*, Columbia University Press, 1998.

⁵ Yusawinur Barella et al., "Menelusuri Sejarah Islam Di Pakistan: Eksplorasi Ide Pembaharuan Muhammad Ali Jinnah," *Intizar* 29, no. 2 (2023): 122–35, <https://doi.org/10.19109/intizar.v29i2.20079>.

⁶ Ernst Haas, *Debates on European Integration: A Reader* (Notre dame: University of Notre Dame Press, 2020).

⁷ Michael E. Smith, *Europe's Foreign and Security Policy: The Institutionalization of Cooperation* (New York: Cambridge university press, 2004).



mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi dari ketiga organisasi regional tersebut. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan dari database akademik seperti Sinta, Scopus, Google Scholar, dan WoS, serta dokumen resmi seperti "ASEAN Charter" dan "Treaty on European Union".

Analisis kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi tema utama, perbedaan, dan kesamaan dalam pendekatan penyelesaian sengketa. Studi oleh Acharya tentang mekanisme "ASEAN Way" dan penelitian oleh Kaunert dan Léonard tentang krisis migran Uni Eropa memberikan wawasan mendalam. Selain itu, penelitian oleh Barnett mengenai dinamika politik dan sektarian di Liga Arab juga menjadi referensi penting. Penelitian ini menggabungkan perspektif historis dan politik dari setiap organisasi, seperti krisis Rohingya di ASEAN dan ketegangan antara negara-negara Teluk di Liga Arab.

Literatur yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama, perbedaan, dan kesamaan dalam pendekatan penyelesaian sengketa di ketiga organisasi regional tersebut. Analisis ini melibatkan pengelompokan informasi berdasarkan kategori yang relevan, seperti prinsip-prinsip penyelesaian sengketa, peran institusi supranasional, dan pengaruh keragaman budaya. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menyusun narasi komprehensif yang menjelaskan bagaimana keragaman budaya mempengaruhi penyelesaian sengketa, serta mengevaluasi kekuatan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing organisasi dalam mengelola keragaman ini.

C. Pembahasan

Keberagaman Penyelesaian Sengketa di Asean, Uni Eropa Dan Liga Arab

Penyelesaian sengketa di tingkat regional adalah aspek penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di berbagai kawasan dunia. ASEAN, Uni Eropa, dan Liga Arab adalah tiga organisasi regional yang masing-masing memiliki pendekatan yang unik dalam menangani sengketa di antara negara anggotanya. Keberagaman budaya, struktur kelembagaan, dan dinamika politik di setiap organisasi ini mempengaruhi cara mereka menyelesaikan sengketa. Artikel ini membahas berbagai pendekatan yang diambil oleh



ASEAN, Uni Eropa, dan Liga Arab dalam penyelesaian sengketa, serta mengevaluasi kekuatan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing organisasi.

ASEAN: Konsensus dan Non-Intervensi

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) adalah organisasi regional yang didirikan pada tahun 1967 dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, dan sosial di Asia Tenggara. Prinsip utama yang mendasari penyelesaian sengketa di ASEAN adalah konsensus dan non-intervensi.⁸ Prinsip ini dikenal sebagai "ASEAN Way," yang mengedepankan dialog dan konsultasi dalam menyelesaikan masalah tanpa campur tangan langsung dalam urusan domestik negara anggota.

Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah dalam penanganan sengketa Laut Cina Selatan. Beberapa negara anggota ASEAN, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Cina. Meskipun ASEAN telah mengadopsi Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DoC) pada tahun 2002 dan terus berupaya untuk merumuskan Kode Etik (CoC) yang mengikat, proses ini berjalan lambat dan penuh tantangan karena tekanan dari Cina dan perbedaan kepentingan nasional di antara negara anggota ASEAN.⁹ Selain itu, krisis Rohingya di Myanmar menunjukkan keterbatasan pendekatan non-intervensi. Meskipun ada tekanan internasional untuk bertindak, ASEAN memilih untuk fokus pada bantuan kemanusiaan dan mediasi, daripada tindakan langsung terhadap pemerintah Myanmar. Pendekatan ini mencerminkan dilema antara menghormati kedaulatan nasional dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁰

Dalam beberapa kasus, seperti sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja mengenai kuil Preah Vihear, ASEAN telah berperan sebagai mediator. Pada tahun 2011, ketika ketegangan meningkat menjadi konflik bersenjata, ASEAN mengadakan pertemuan darurat dan mengirim misi pengamat untuk memantau gencatan senjata. Meskipun mediasi ini tidak sepenuhnya mengakhiri konflik, hal ini menunjukkan peran ASEAN dalam memfasilitasi dialog dan mengurangi ketegangan.¹¹

⁸ Vanizia Ulhaq, "Peran Asean Intergovernmental Commission On Human Right Dalam Penanganan Krisis Hak Asasi Manusia Terkait Kudeta Militer Di Myanmar Periode 2021-2022," *UIN SYARIF HIDAYATULLAH* (2022).

⁹ Carlyle A. Thayer, "China's New Wave of Aggressive Assertiveness in the South China Sea," *International Journal of China Studies* 2, no. 3 (2011): 555–83.

¹⁰ Donald E Weatherbee, *Asean Half Century*, ed. Amprint of Im (London: Littlefield Publishing Group, 2019).

¹¹ Acharya, "Constr. a Secur. Community Southeast Asia."



Uni Eropa: Mekanisme Hukum dan Integrasi Supranasional

Uni Eropa (UE) merupakan contoh organisasi regional dengan tingkat integrasi supranasional yang tinggi. UE memiliki struktur kelembagaan yang kompleks dan mekanisme hukum yang kuat untuk penyelesaian sengketa. *Court of Justice of the European Union* (CJEU) berperan penting dalam menegakkan hukum UE dan menyelesaikan sengketa antara negara anggota dan institusi UE.¹²

Krisis migran yang memuncak pada tahun 2015 merupakan ujian besar bagi mekanisme penyelesaian sengketa di UE. Kebijakan pergerakan bebas di dalam Schengen Area, yang memungkinkan pergerakan bebas antar negara anggota, menghadapi tantangan besar dengan masuknya jutaan pengungsi dan migran dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Uni Eropa merespons dengan berbagai kebijakan dan mekanisme untuk membagi tanggung jawab pengungsi di antara negara anggota, meskipun ini memicu ketegangan dan perbedaan pendapat yang signifikan.¹³

Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa, juga menunjukkan bagaimana perbedaan politik dan kepentingan nasional dapat mempengaruhi dinamika regional. Proses negosiasi Brexit yang panjang dan kompleks mencerminkan tantangan dalam menjaga kesatuan dan solidaritas di dalam UE. Meskipun demikian, UE berhasil mempertahankan posisi yang kuat dan terkoordinasi dalam negosiasi dengan Inggris, menunjukkan kapasitasnya untuk mengelola sengketa besar melalui mekanisme supranasional.¹⁴

Sengketa hukum lainnya yang menonjol adalah kasus Catalonia di Spanyol. Upaya wilayah Catalonia untuk merdeka pada tahun 2017 menimbulkan krisis konstitusional di Spanyol dan UE. Meskipun UE menyatakan dukungan untuk integritas teritorial Spanyol, kasus ini menunjukkan bagaimana masalah domestik dapat memiliki implikasi regional yang luas dan menantang prinsip-prinsip hukum yang mendasari UE.¹⁵

¹² Dwiki Puspita sari, "Peran Dan Fungsi Uni Eropa Dalam Perkembangan Kasus Referendum Kemerdekaan Catalunya (2014-2019)" (Universitas Islam Indonesia, 2021).

¹³ Christian Kautert and Sarah Léonard, "The European Union Asylum Policy after the Treaty of Lisbon and the Stockholm Programme: Towards Supranational Governance in a Common Area of Protection?," *Refugee Survey Quarterly* 31, no. 4 (2012): 1–20, <https://doi.org/10.1093/rsq/hds018>.

¹⁴ Tim Oliver, "European and International Views of Brexit," *Journal of European Public Policy* 23, no. 9 (2016): 1321–28, <https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1174534>.

¹⁵ Windy Dermawan, Fakhri Sabiq Muawal, and Henike Primawanti, "Konflik Internal Dalam Hubungan Internasional Menyual Konflik Antara Pemerintah Spanyol Dengan Catalonia," *Journal of Global and Multidisciplinary* 1, no. 4 (2023): 462–74, <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple> INSTITERCOMPUBLISHER<https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple>.



Liga Arab: Konflik Politik dan Sektarian

Liga Arab adalah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara Arab dengan kesamaan budaya dan bahasa, tetapi memiliki perbedaan politik dan sektarian yang signifikan. Perbedaan ini sering kali menghambat efektivitas Liga Arab dalam menyelesaikan sengketa. Salah satu contoh paling menonjol adalah perang saudara di Suriah, yang dimulai pada tahun 2011. Liga Arab berusaha untuk menengahi konflik ini melalui berbagai inisiatif, termasuk mengirim misi pengamat dan mendukung solusi politik, namun perpecahan di antara negara anggota mengenai dukungan terhadap pihak-pihak yang berkonflik menghambat upaya mediasi yang efektif.¹⁶

Konflik di Yaman, yang dimulai pada tahun 2015, juga menunjukkan tantangan dalam penyelesaian sengketa di Liga Arab. Perang ini melibatkan intervensi militer dari beberapa negara anggota Liga Arab, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang mendukung pemerintah Yaman melawan pemberontak Houthi. Perbedaan kepentingan dan strategi di antara negara-negara Arab menghambat koordinasi dan penyelesaian konflik, meskipun Liga Arab berusaha untuk mempromosikan solusi politik.¹⁷

Ketegangan antara negara-negara Teluk, seperti blokade yang dipimpin oleh Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017, juga mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Liga Arab. Meskipun terdapat kesamaan budaya dan agama, perbedaan politik dan strategi nasional sering kali menciptakan gesekan yang sulit untuk diselesaikan. Liga Arab, dengan struktur kelembagaan yang relatif lemah, sering kali kesulitan untuk memfasilitasi dialog dan mediasi yang efektif di tengah perbedaan ini.¹⁸

Peran Institusi Supranasional

Institusi supranasional memiliki peran yang berbeda dalam mengelola keragaman dan menyelesaikan sengketa di setiap organisasi regional. Di ASEAN, Sekretariat ASEAN memiliki peran yang terbatas dalam mediasi sengketa, karena prinsip non-intervensi dan kedaulatan nasional yang kuat. Namun, inisiatif seperti ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) menunjukkan upaya untuk

¹⁶ Barnett, *Dialogues in Arab Politics: Negotiations in Regional Order*.

¹⁷ Peter Salisbury, "Yemen: National Chaos, Local Order," Policy Commons, 2017.

¹⁸ Muhammad Zulfikar Rakhmat and Ahmad Turmuzdi, "Analisis Kebijakan Arab Saudi Terkait Blokade Qatar Ditinjau Dari Perspektif Two Level Game Theory," *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 26, no. 01 (2020): 232–54, <https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.27>.



memperkuat peran supranasional dalam isu-isu hak asasi manusia, meskipun dengan mandat yang terbatas.¹⁹

Di Uni Eropa, institusi supranasional seperti Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan CJEU memiliki kekuatan yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh perusahaan, Komisi Eropa memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memberikan sanksi yang berat. CJEU juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa antar negara anggota dan memastikan bahwa hukum UE diterapkan secara konsisten²⁰

Sebaliknya, Liga Arab memiliki struktur kelembagaan yang lebih lemah dengan peran yang terbatas dalam menyelesaikan sengketa. Sekretariat Jenderal Liga Arab dan Dewan Liga Arab sering kali menghadapi kesulitan dalam menegakkan keputusan yang diambil karena kurang

Pengaruh Keragaman Budaya dalam Penyelesaian Sengketa

Keragaman budaya memainkan peran penting dalam membentuk pendekatan penyelesaian sengketa di ketiga organisasi regional ini. Di ASEAN, keragaman budaya di antara negara-negara anggota mencakup perbedaan bahasa, agama, dan tradisi politik yang beragam. Hal ini mempengaruhi pendekatan yang lebih berorientasi pada dialog dan konsensus dalam menyelesaikan sengketa, meskipun kadang-kadang menghasilkan keputusan yang lambat dan tidak efektif.²¹

Di Uni Eropa, keragaman budaya menjadi bagian integral dari identitas Eropa yang kompleks. Namun, perbedaan budaya ini juga menimbulkan tantangan dalam mencapai kesepakatan di tingkat Uni Eropa. Kebijakan dan hukum UE yang mengedepankan prinsip supranasional memungkinkan respons yang lebih terkoordinasi dan efektif dalam mengelola perbedaan budaya di antara negara anggota.²²

Di Liga Arab, keragaman budaya yang sama dalam hal bahasa dan agama tidak serta merta mempermudah penyelesaian sengketa. Sebaliknya, perbedaan politik dan sektarian sering kali memperumit upaya mediasi dan penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan budaya saja tidak cukup untuk memastikan efektivitas

¹⁹ Catherine Drummond, "The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) and the Responsibility to Protect: Development and Potential," no. 1 (2010): 1–36.

²⁰ Donald E Weatherbee, *Asean Half Century*.

²¹ Acharya, "Constr. a Secur. Community Southeast Asia."

²² Kaunert and Léonard, "The European Union Asylum Policy after the Treaty of Lisbon and the Stockholm Programme: Towards Supranational Governance in a Common Area of Protection?"



penyelesaian sengketa, tetapi diperlukan juga struktur kelembagaan yang kuat dan komitmen politik dari negara anggota.²³

Diskusi: Pengaruh Keragaman Budaya dan Institusional

Pengaruh keragaman budaya dan struktur kelembagaan dalam penyelesaian sengketa regional adalah topik yang kompleks dan multidimensional. ASEAN, Uni Eropa, dan Liga Arab masing-masing menghadapi tantangan unik dalam mengelola keragaman di antara negara anggotanya. Diskusi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana keragaman budaya dan peran institusi supranasional mempengaruhi kemampuan ketiga organisasi ini dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, akan dibahas kekuatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola keragaman tersebut.

Keragaman Budaya: Tantangan dan Peluang

ASEAN

Keragaman budaya di ASEAN mencakup perbedaan bahasa, agama, dan tradisi politik yang beragam di antara negara-negara anggotanya. ASEAN terdiri dari negara-negara dengan mayoritas penduduk yang berbeda, seperti Islam di Indonesia dan Malaysia, Buddha di Thailand dan Myanmar, serta Katolik di Filipina. Perbedaan ini mempengaruhi pendekatan negara-negara anggota dalam menangani isu-isu domestik dan regional.²⁴

Prinsip utama yang mendasari kerjasama ASEAN adalah konsensus dan non-intervensi. Pendekatan ini dikenal sebagai "ASEAN Way," yang mengedepankan dialog dan konsultasi dalam menyelesaikan masalah tanpa campur tangan langsung dalam urusan domestik negara anggota. Pendekatan ini bertujuan untuk menghormati keragaman budaya dan politik di antara negara-negara anggota, namun seringkali menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lambat dan kurang efektif.

Contoh nyata dari pengaruh keragaman budaya dalam penyelesaian sengketa di ASEAN adalah krisis Rohingya di Myanmar. Meskipun ada tekanan internasional untuk bertindak, ASEAN memilih untuk fokus pada bantuan kemanusiaan dan mediasi, daripada tindakan langsung terhadap pemerintah Myanmar. Pendekatan ini mencerminkan dilema antara menghormati kedaulatan nasional dan perlindungan hak

²³ Nur Tafsin, "Peran Politik Dewan Mufti Di Rusia," *Inright : Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2014).

²⁴ Azyumardi Azra, *Islam Perspektif Etno Lingustik Dan Geo Politik* (Depok: Rajawali Press, 2019).



asasi manusia. Pendekatan ASEAN dalam menangani krisis Rohingya menunjukkan keterbatasan prinsip non-intervensi dalam situasi di mana pelanggaran hak asasi manusia terjadi.²⁵

Uni Eropa

Uni Eropa (UE) memiliki tingkat keragaman budaya yang tinggi, dengan 27 negara anggota yang memiliki bahasa, budaya, dan tradisi politik yang berbeda. Namun, UE telah berhasil mengembangkan mekanisme untuk mengelola keragaman ini melalui integrasi supranasional dan harmonisasi hukum. Mekanisme ini memungkinkan negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk penyelesaian sengketa.

Salah satu contoh bagaimana UE mengelola keragaman budaya adalah dalam penanganan krisis migran yang memuncak pada tahun 2015. Kebijakan pergerakan bebas di dalam Schengen Area memungkinkan pergerakan bebas antar negara anggota, tetapi krisis migran menantang prinsip ini. UE merespons dengan berbagai kebijakan dan mekanisme untuk membagi tanggung jawab pengungsi di antara negara anggota, meskipun ini memicu ketegangan dan perbedaan pendapat yang signifikan. Pendekatan UE dalam mengelola krisis migran menunjukkan kapasitasnya untuk menavigasi keragaman budaya melalui kebijakan supranasional yang koheren.²⁶

Brexit adalah contoh lain dari bagaimana perbedaan budaya dan politik dapat mempengaruhi dinamika regional di UE. Proses negosiasi Brexit yang panjang dan kompleks mencerminkan tantangan dalam menjaga kesatuan dan solidaritas di dalam UE. Namun, UE berhasil mempertahankan posisi yang kuat dan terkoordinasi dalam negosiasi dengan Inggris, menunjukkan kapasitasnya untuk mengelola sengketa besar melalui mekanisme supranasional.²⁷

Liga Arab

Liga Arab terdiri dari negara-negara Arab yang memiliki kesamaan budaya dan bahasa, namun memiliki perbedaan politik dan sektarian yang signifikan. Perbedaan ini sering kali menghambat efektivitas Liga Arab dalam menyelesaikan sengketa. Contoh paling menonjol adalah perang saudara di Suriah, yang dimulai pada tahun 2011. Liga

²⁵ Yusril Ihza Adilfi, "Peran Asean Dalam Mengatasi Masalah Human Security Di Kawasan Asia Tenggara" (Universitas Hasanuddin, 2022).

²⁶ Kaunert and Léonard, "The European Union Asylum Policy after the Treaty of Lisbon and the Stockholm Programme: Towards Supranational Governance in a Common Area of Protection?"

²⁷ Oliver, "European and International Views of Brexit."



Arab berusaha untuk menengahi konflik ini melalui berbagai inisiatif, termasuk mengirim misi pengamat dan mendukung solusi politik, namun perpecahan di antara negara anggota mengenai dukungan terhadap pihak-pihak yang berkonflik menghambat upaya mediasi yang efektif.²⁸

Konflik di Yaman juga menunjukkan tantangan dalam penyelesaian sengketa di Liga Arab. Perang ini melibatkan intervensi militer dari beberapa negara anggota Liga Arab, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang mendukung pemerintah Yaman melawan pemberontak Houthi. Perbedaan kepentingan dan strategi di antara negara-negara Arab menghambat koordinasi dan penyelesaian konflik, meskipun Liga Arab berusaha untuk mempromosikan solusi politik.²⁹

Peran Institusi Supranasional

ASEAN

Di ASEAN, institusi supranasional seperti Sekretariat ASEAN memiliki peran yang terbatas dalam mediasi sengketa karena prinsip non-intervensi dan kedaulatan nasional yang kuat. Namun, inisiatif seperti ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) menunjukkan upaya untuk memperkuat peran supranasional dalam isu-isu hak asasi manusia, meskipun dengan mandat yang terbatas.³⁰

Peran institusi supranasional di ASEAN seringkali lebih berfokus pada fasilitasi dialog dan konsultasi daripada penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja mengenai kuil Preah Vihear, ASEAN mengadakan pertemuan darurat dan mengirim misi pengamat untuk memantau gencatan senjata. Meskipun mediasi ini tidak sepenuhnya mengakhiri konflik, hal ini menunjukkan peran ASEAN dalam memfasilitasi dialog dan mengurangi ketegangan.³¹

Uni Eropa

Uni Eropa memiliki struktur kelembagaan yang lebih kuat dibandingkan ASEAN dan Liga Arab, dengan institusi supranasional yang memiliki wewenang signifikan dalam penyelesaian sengketa. Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan *Court of Justice of the European Union* (CJEU) memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa.

²⁸ Barnett, *Dialogues in Arab Politics: Negotiations in Regional Order*.

²⁹ Peter Salisbury, "Yemen: National Chaos, Local Order."

³⁰ Saidatul Nadia and Abd Aziz, *The Evolution of The ASEAN Human Rights Mechanism Institutional and Thematic Issues Within Edited By*, 2021.

³¹ Acharya, "Constr. a Secur. Community Southeast Asia."



CJEU berfungsi sebagai pengadilan tertinggi di UE dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara negara anggota dan institusi UE. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh perusahaan, Komisi Eropa memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memberikan sanksi yang berat. CJEU memastikan bahwa hukum UE diterapkan secara konsisten dan memberikan putusan yang mengikat bagi negara anggota.³²

Institusi supranasional UE juga berperan penting dalam mengelola krisis migran. Kebijakan seperti Dublin Regulation, yang menentukan negara anggota yang bertanggung jawab untuk memproses aplikasi suaka, adalah contoh bagaimana UE mengelola keragaman melalui mekanisme hukum yang koheren. Meskipun ada ketegangan dan perbedaan pendapat di antara negara anggota, institusi supranasional UE berhasil menjaga kerjasama dan koordinasi dalam menghadapi krisis ini.

Liga Arab

Liga Arab memiliki struktur kelembagaan yang lebih lemah dengan peran yang terbatas dalam menyelesaikan sengketa. Sekretariat Jenderal Liga Arab dan Dewan Liga Arab sering kali menghadapi kesulitan dalam menegakkan keputusan yang diambil karena kurangnya mekanisme penegakan yang efektif dan perbedaan kepentingan di antara negara anggota.³³

Konflik di Suriah dan Yaman adalah contoh bagaimana perbedaan politik dan sektarian menghambat upaya mediasi Liga Arab. Meskipun ada inisiatif untuk mengirim misi pengamat dan mendukung solusi politik, kurangnya dukungan dan koordinasi di antara negara anggota sering kali menghambat efektivitas upaya tersebut.³⁴

Ketegangan antara negara-negara Teluk, seperti blokade yang dipimpin oleh Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017, juga mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Liga Arab. Liga Arab sering kali kesulitan untuk memfasilitasi dialog dan mediasi yang efektif di tengah perbedaan ini, menunjukkan keterbatasan peran institusi supranasional dalam menyelesaikan sengketa.

³² Donald E Weatherbee, *Asean Half Century*.

³³ Boer Mauna, "Dinamika Lingkungan Global Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Prioris 2*, no. 1 (2008).

³⁴ Peter Salisbury, "Yemen: National Chaos, Local Order."



Kekuatan dan Tantangan dalam Mengelola Keberagaman

Pengelolaan keragaman budaya dalam konteks organisasi regional seperti ASEAN, Uni Eropa, dan Liga Arab melibatkan berbagai kekuatan dan tantangan. Keragaman budaya ini tidak hanya mencakup perbedaan etnis dan agama tetapi juga menyentuh aspek politik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas. Dalam upaya mengelola keragaman, setiap organisasi regional menghadapi situasi unik yang dipengaruhi oleh sejarah, struktur kelembagaan, dan dinamika politik internal dan eksternal.

Kekuatan dalam Mengelola Keragaman

- **Kekayaan Budaya dan Identitas:** Salah satu kekuatan utama dalam mengelola keragaman adalah kekayaan budaya dan identitas yang dimiliki oleh negara-negara anggota. Di ASEAN, misalnya, keragaman budaya menjadi dasar untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama regional. Menurut Acharya (2014), prinsip-prinsip seperti konsensus dan non-intervensi yang diterapkan ASEAN membantu menciptakan suasana saling menghormati di antara negara anggota, yang berbeda dalam budaya, agama, dan sistem politik. Hal ini memungkinkan ASEAN untuk mempromosikan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
- **Mekanisme Institusional yang Adaptif:** Mekanisme institusional yang fleksibel dan adaptif merupakan kekuatan lain dalam mengelola keragaman. Uni Eropa, misalnya, memiliki struktur supranasional yang memungkinkan negara-negara anggotanya bekerja sama lebih erat dalam berbagai bidang, termasuk penyelesaian sengketa. Komisi Eropa dan Pengadilan Eropa memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan memediasi konflik, yang memperkuat integrasi regional. Menurut Weatherill (2016), mekanisme ini membantu memastikan bahwa keragaman budaya tidak menjadi penghalang, tetapi justru memperkaya proses integrasi dan kerja sama.
- **Pengembangan Kebijakan Multikultural:** Kebijakan yang mendukung multikulturalisme juga menjadi kekuatan dalam mengelola keragaman. Liga Arab, meskipun sering menghadapi tantangan politik dan sektarian, berupaya untuk mengembangkan kebijakan yang mempromosikan persatuan dan solidaritas di antara negara-negara anggotanya. Penelitian Barnett (1998) menunjukkan bahwa dialog politik dan negosiasi antaranggota Liga Arab sering kali berlandaskan pada



upaya untuk menghormati dan mengakomodasi perbedaan budaya dan identitas nasional.

Tantangan dalam Mengelola Keragaman

- **Konflik Etnis dan Agama:** Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola keragaman adalah konflik etnis dan agama. Di ASEAN, misalnya, krisis Rohingya di Myanmar menunjukkan bagaimana perbedaan etnis dan agama dapat memicu ketegangan dan kekerasan. Menurut Weatherbee (2019), ketidakmampuan ASEAN untuk secara efektif menanggapi krisis ini mencerminkan keterbatasan mekanisme regional dalam menangani isu-isu hak asasi manusia yang kompleks dan sensitif.³⁵
- **Ketidaksetaraan Ekonomi dan Sosial:** Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di antara negara anggota juga merupakan tantangan signifikan. Uni Eropa, meskipun memiliki mekanisme redistribusi dan bantuan regional, masih menghadapi ketegangan antara negara-negara kaya di Barat dan negara-negara kurang maju di Timur. Penelitian oleh Kaunert dan Léonard (2012) menunjukkan bahwa krisis migran memperburuk perbedaan ini, dengan negara-negara seperti Hungaria dan Polandia menolak kebijakan redistribusi migran yang diusulkan oleh Uni Eropa.
- **Kedaulatan Nasional vs. Integrasi Regional:** Perbedaan dalam prioritas antara kedaulatan nasional dan integrasi regional juga menjadi tantangan besar. Liga Arab sering kali menghadapi kesulitan dalam mencapai konsensus karena kepentingan nasional yang berbeda-beda di antara anggotanya. Menurut Roberts (2017), ketegangan antara negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar menunjukkan bagaimana persaingan politik dan ekonomi internal dapat menghambat upaya kolektif untuk mengelola keragaman dan menyelesaikan konflik regional.
- **Kurangnya Kapasitas Institusional:** Kapasitas institusional yang terbatas juga menghambat efektivitas organisasi regional dalam mengelola keragaman. Misalnya, ASEAN tidak memiliki mekanisme penegakan yang kuat seperti yang dimiliki Uni Eropa. Menurut penelitian oleh Leonard dan Kaunert (2012), tanpa institusi supranasional yang kuat, upaya ASEAN untuk menangani isu-isu hak

³⁵ Donald E Weatherbee, *Asean Half Century*.



asasi manusia dan konflik etnis sering kali terbatas pada deklarasi dan pernyataan tanpa tindakan konkret.

D. Penutup

Penelitian ini menyoroti pentingnya desain institusional dan pengakuan terhadap keragaman budaya dalam penyelesaian sengketa regional. ASEAN perlu mempertimbangkan reformasi terhadap prinsip non-intervensi untuk meningkatkan respons kolektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Uni Eropa perlu terus memperkuat mekanisme hukumnya dan mencari cara untuk mengatasi tantangan nasionalisme yang muncul. Liga Arab harus memperkuat struktur kelembagaannya dan mempromosikan dialog yang lebih inklusif di antara anggotanya untuk menangani perbedaan politik dan sektarian. Dengan memahami kekuatan dan tantangan masing-masing organisasi dalam mengelola keragaman budaya dan menyelesaikan sengketa, pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian regional. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan multikulturalisme dan integrasi regional dapat diimplementasikan secara lebih efektif dalam konteks yang berbeda.

REFERENSI

- Acharya, Amitav. "Constructing a Security Community in Southeast Asia." *Constructing a Security Community in Southeast Asia*, 2014. <https://doi.org/10.4324/9781315796673>.
- Adilfi, Yusril Ihza. "Peran Asean Dalam Mengatasi Masalah Human Security Di Kawasan Asia Tenggara." Universitas Hasanuddin, 2022.
- Azyumardi Azra. *Islam Perspektif Etno Lingustik Dan Geo Politik*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Barella, Yusawinur, Umi Nur Kholifatun, Hasaruddin Hasaruddin, and Syamzan Syukur. "Menelusuri Sejarah Islam Di Pakistan: Eksplorasi Ide Pembaharuan Muhammad Ali Jinnah." *Intizar* 29, no. 2 (2023): 122–35. <https://doi.org/10.19109/intizar.v29i2.20079>.
- Barnett, Michael N. *Dialogues in Arab Politics: Negotiations in Regional Order*. Columbia University Press, 1998.
- Boer Mauna. "Dinamika Lingkungan Global Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 1 (2008).
- Dermawan, Windy, Fakhri Sabiq Muawal, and Henike Primawanti. "Konflik Internal Dalam Hubungan Internasional Menyoal Konflik Antara Pemerintah Spanyol Dengan



- Catalonia.” *Journal of Global and Multidisciplinary* 1, no. 4 (2023): 462–74. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multipleINSTITERCOMPUBLISHERhttps://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple>.
- Donald E Weatherbee. *Asean Half Century*. Edited by Amprint of Im. London: Littlefield Publishing Group, 2019.
- Drummond, Catheirine. “The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) and the Responsibility to Protect : Development and Potential,” no. 1 (2010): 1–36.
- Dwike Puspita sari. “Peran Dan Fungsi Uni Eropa Dalam Perkembangan Kasus Referendum Kemerdekaan Catalunya (2014-2019).” Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Eldaa, Monica Roza Nandelialia. “Eksistensi ASEAN Sebagai Organisasi Regional Pada Aspek Sosial Budaya Melalui Program Student Mobility.” *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 3 (2024): 436–44. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i3.213>.
- Ernst Haas. *Debates on European Integration: A Reader*. Notre dame: University of Notre Dame Press, 2020.
- Kaunert, Christian, and Sarah Léonard. “The European Union Asylum Policy after the Treaty of Lisbon and the Stockholm Programme: Towards Supranational Governance in a Common Area of Protection?” *Refugee Survey Quarterly* 31, no. 4 (2012): 1–20. <https://doi.org/10.1093/rsq/hds018>.
- Michael E. Smith. *Europe’s Foreign and Security Policy: The Institutionalization of Cooperation*. New York: Cambridge university press, 2004.
- Nadia, Saidatul, and Abd Aziz. *The Evolution of The ASEAN Human Rights Mechanism Institutional and Thematic Issues Within Edited By*, 2021.
- Oliver, Tim. “European and International Views of Brexit.” *Journal of European Public Policy* 23, no. 9 (2016): 1321–28. <https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1174534>.
- Peter Salisbury. “Yemen: National Chaos, Local Order.” Policy Commons, 2017.
- Rakhmat, Muhammad Zulfikar, and Ahmad Turmudzi. “Analisis Kebijakan Arab Saudi Terkait Blokade Qatar Ditinjau Dari Perspektif Two Level Game Theory.” *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 26, no. 01 (2020): 232–54. <https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.27>.
- Tafsin, Nur. “Peran Politik Dewan Mufti Di Rusia.” *Inright : Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2014).
- Thayer, Carlyle A. “China’s New Wave of Aggressive Assertiveness in the South China Sea.” *International Journal of China Studies* 2, no. 3 (2011): 555–83.
- Thomas Risse. *A Community of Europeans ? Transnational Identities and Public Spheres*. New York: Cornell University Press, 2010.



Ulhaq, Vanizia. “Peran Asean Intergovernmental Commission On Human Right Dalam Penanganan Krisis Hak Asasi Manusia Terkait Kudeta Militer Di Myanmar Periode 2021-2022.” *UIN SYARIF HIDAYATULLAH*, 2022.